



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, DAN BPLS)**

Tahun Sidang : 2009 - 2010
Masa Sidang : II
Rapat : Ke – 11 (sebelas)
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal : Rabu, 3 Februari 2010
Sifat : Terbuka
Pukul : 09.30 WIB s.d 13.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V)
Acara : 1. Evaluasi Program/kegiatan Tahun Anggaran 2009
2. Persiapan program/kegiatan Tahun Anggaran 2010
Ketua Rapat : Ir. H. Mulyadi
Sekretaris : Dra. Hani Yuliasih
Hadir Anggota : dari 53 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra : Kepala BPLS beserta jajaran terkait

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pukul 09.30 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua menyampaikan agenda rapat kerja hari ini adalah evaluasi program/kegiatan Tahun Anggaran 2009 dan persiapan program/kegiatan Tahun Anggaran 2010 dari Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.
3. Ketua mempersilakan Kepala BPLS untuk menyampaikan paparannya.
4. Ketua mempersilakan anggota Komisi V untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaan.

II. KEPUTUSAN RAPAT

1. Komisi V DPR RI meminta Badan Pelaksana BPLS untuk melakukan kajian-kajian baru untuk mendapatkan solusi alternatif dalam penanggulangan masalah lumpur Sidoarjo, dampak sosial dan infrastruktur secara komprehensif yang bersifat jangka panjang.
2. Terkait percepatan pembebasan lahan untuk relokasi infrastruktur serta untuk menekan angka "loss opportunity" dan ekonomi biaya tinggi akibat mundurnya penyelesaian kegiatan yang mengakibatkan kemacetan di jalur arteri, maka Komisi V DPR RI mendesak Badan Pelaksana BPLS agar meningkatkan koordinasi dengan BPN, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk segera mengambil langkah-langkah penyelesaian pembayaran ganti rugi.

3. Komisi V DPR RI meminta Badan Pelaksana BPLS untuk membuat sebuah mekanisme pengawasan dalam menetapkan volume pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh Kontraktor Pelaksana Tugas, secara transparan dan akuntabel dalam rangka menjamin tidak adanya kerugian negara.
4. Terkait penanganan lumpur yang bersifat jangka panjang, maka Komisi V DPR RI mendorong Badan Pelaksana BPLS melakukan kajian alternatif kemungkinannya untuk dapat ditangani secara swakelola.
5. Mengingat masalah lumpur Sidoarjo bersifat jangka panjang dan berdasarkan perkiraan paling cepat 30 tahun, maka terkait dana yang sudah dikeluarkan secara kontraktual dalam penanganan infrastruktur cukup besar, maka Komisi V DPR RI akan membentuk Panja untuk mendalami hal tersebut, termasuk menyiapkan konsep baru.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.30 WIB.

Jakarta, 3 Februari 2010

KETUA RAPAT,

ttd

IR. H. MULYADI

